



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 8. Para Gubernur; dan
 9. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENCATATAN PENGADAAN LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK MENINGKATKAN AKURASI NILAI REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI

1. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengambil peran penting dalam mendorong perekonomian nasional dan mendukung program Pemerintah. Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi juga meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan

Indonesia. Nilai belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bisa mencapai lebih dari Rp1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah) setiap tahunnya, menjadi potensi besar untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, rata-rata nilai realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tercatat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik hanya sebesar 44% (empat puluh empat persen) terhadap nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP). Masih sedikitnya nilai realisasi yang tercatat pada sistem, salah satunya diakibatkan rendahnya nilai pencatatan pengadaan langsung dan penunjukan langsung untuk realisasi yang tidak dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Pada Tahun Anggaran 2022, hanya 52% (lima puluh dua persen) dari nilai Rencana Umum Pengadaan pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang tercatat realisasinya pada sistem. Sedangkan realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung Tahun Anggaran 2023 baru mencapai 27% (dua puluh tujuh persen) per 4 Agustus 2023.

Rendahnya pencatatan realisasi pengadaan pada sistem pengadaan akan berdampak terhadap menurunnya kinerja pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Terutama kinerja dalam mencapai target belanja produk dalam negeri serta produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, karena sebagian besar belanja pengadaan langsung dan penunjukan langsung terkait pemanfaatan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan Koperasi. Rendahnya pencatatan ini pada akhirnya akan mempengaruhi akurasi pencapaian target Nasional dan pengukuran dampak belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mendorong Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu pencatatan realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang tidak dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

4. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112).

5. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan khususnya realisasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, agar:
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pencatatan realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
 - b. Kepala Daerah memerintahkan seluruh PA untuk mencatatkan realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

- c. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah memerintahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di lingkup masing-masing Kementerian/Lembaga/Kepala Daerah.
- d. Panduan pencatatan pada sistem mengacu kepada Petunjuk Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk PPK yang tayang pada aplikasi INAPROC sebagaimana terlampir.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pencatatan realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung untuk meningkatkan akurasi nilai realisasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHARDI

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENCATATAN PENGADAAN
LANGSUNG DAN PENUNJUKAN
LANGSUNG UNTUK MENINGKATKAN
AKURASI NILAI REALISASI BELANJA
PRODUK DALAM NEGERI DAN
PRODUK USAHA MIKRO, USAHA
KECIL, DAN KOPERASI

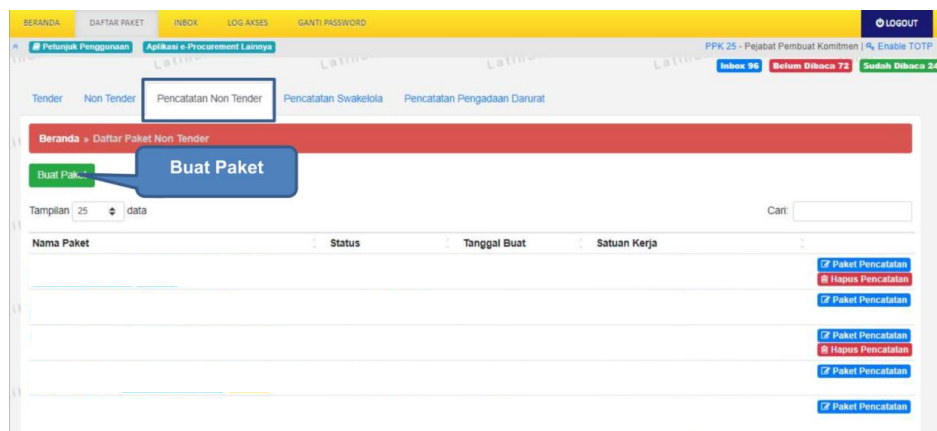
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2023

PANDUAN PENCATATAN NON-TENDER

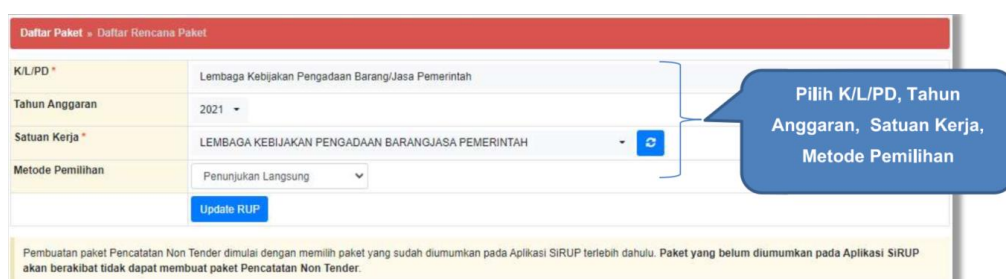
A. Pembuatan Paket Pencatatan Non-Tender

Pembuatan paket pencatatan Non-Tender dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pilih daftar paket kemudian pilih tab “Pencatatan Non-Tender”



2. Pilih paket yang terdapat pada RUP (Rencana Umum Pengadaan)



3. Ceklis paket yang ingin dibuat, lalu klik buat paket.

Tampilan 25 data

Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Metode Pemilihan Penyedia	Pagu	Tahun Anggaran
<input type="checkbox"/>	30108394 Pengembangan dan Integrasi Sistem Katalog Elektronik / Belanja Modal Lainnya	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 1,5 M	2021
<input type="checkbox"/>	30042892 Sewa Collocation Data Center IDC	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 1,2 M	2021
<input type="checkbox"/>	30037651 Sewa Collocation Data Center DCI	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 2,5 M	2021
<input type="checkbox"/>	29992456 Jasa Penanganan Pandemic Covid-19 (Swab Test)	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 256,6 Jt	2021
<input type="checkbox"/>	29894456 Jasa Penanganan Pandemic Covid-19 (Swab Test)	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 2,3 M	2021
<input type="checkbox"/>	29641828 Pemeliharaan PC/Notebook	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 70 Jt	2021
<input type="checkbox"/>	29641756 Pemeliharaan Inventaris Peralatan Kantor	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 22,5 Jt	2021
<input type="checkbox"/>	29488878 Pemeliharaan Lift	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 569 Jt	2021

Tampilan 1 sampai 9

Pilih Paket

Buat Paket

« 1 »

Buat Paket

4. Klik OK

latihan-lpse.lkpp.go.id says
Apakah benar ini Paket Anda?

OK **Cancel**

Klik ok

Update RUP

Pembuatan paket Pencatatan Non Tender dimulai dengan memilih paket yang sudah diumumkan pada Aplikasi SIRUP terlebih dahulu. Paket yang belum diumumkan pada Aplikasi SIRUP akan berakibat tidak dapat membuat paket Pencatatan Non Tender.

Tampilan 25 data

Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Metode Pemilihan Penyedia	Pagu	Tahun Anggaran
<input checked="" type="checkbox"/>	30108394 Pengembangan dan Integrasi Sistem Katalog Elektronik / Belanja Modal Lainnya	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 1,5 M	2021

5. Lengkapi lokasi paket dan klik simpan paket

Daftar Paket » Edit Paket

Rencana Umum Pengadaan

Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
30108394	Pengembangan dan Integrasi Sistem Katalog Elektronik / Belanja Modal Lainnya	APBN

1. Input Lokasi Pekerjaan

K/LPD: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Satuan Kerja: LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH

Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Kode Anggaran	Nilai	PPK
	2021	APBN	CJ 6320.AFA.221.052.0A.536111	Rp. 1.508.100.000,00	PPK 2

Nama Paket *
Pengembangan dan Integrasi Sistem Katalog Elektronik / Belanja Modal Lainnya

Nilai Pagu Paket: Rp. 1.508.100.000,00

2. Simpan Paket

Provinsi *	Kabupaten/Kota *	Detail Lokasi *
DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	LKPP

2. Simpan Paket

Simpan dan Membuat Paket **Kembali**

* Wajib diisi.

6. Setelah telah berhasil disimpan, klik kembali.

Daftar Paket » Edit Paket

Data paket telah tersimpan **Paket berhasil disimpan**

Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	30108394	Pembangunan dan Integrasi Sistem Katalog Elektronik / Belanja Modal Lainnya	APBN

Tambah Rencana Pengadaan **Update Rencana Pengadaan**

K/L/PPD: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Satuan Kerja: LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Kode Anggaran	Nilai	PPK
	2021	APBN	CJ.6320.AFA.221.052.0A.536111	Rp. 1.508.100.000,00	PPK 2

Nama Paket *: Pembangunan dan Integrasi Sistem Katalog Elektronik / Belanja Modal Lainnya

Nilai Pagu Paket: Rp. 1.508.100.000,00

Lokasi Pekerjaan *

Provinsi *	Kabupaten/Kota *	Detail Lokasi *
DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	LKPP

Tambah Lokasi

Simpan dan Membuat Paket **Kembali** **Pilih kembali**

B. Edit Paket Pencatatan Non-Tender

Untuk merubah paket pencatatan Non-Tender dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pilih paket pencatatan

Beranda » Daftar Paket Non Tender

Buat Paket

Tampilan: 25 data

Pilih paket pencatatan

Nama Paket	Status	Tanggal Buat	Satuan Kerja
Konsultansi Pengawasan Penataan Ulang Basement 2 Pengadaan Langsung spse 4.5	Draft	16 Juni 2022	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Belanja Jasa Lainnya Rangka FM Pencatatan Pengadaan Langsung spse 4.4	Paket Sudah Selesai	27 April 2021	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Belanja Jasa Lainnya Pengadaan Langsung spse 4.4	Draft	27 April 2021	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- Fullboard meeting Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama (40 orang x 2 Hr x 2 K)	Paket Sudah Selesai	15 Maret 2021	DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN
- Laptop Penunjukan Langsung spse 4.3	Paket Sudah Selesai	22 Mei 2020	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Pilih jenis pengadaan, metode pemilihan, bukti pembayaran, tanggal selesai paket, uraian pekerjaan, serta realisasi anggaran.

Beranda » Daftar Paket » Edit Pencatatan Non Tender

Penting:
Paket Pencatatan Non Tender wajib diisi dengan lengkap.

Kode Paket	604999								
Nama Paket	Pengembangan dan Integrasi Sistem Katalog Elektronik / Belanja Modal Lainnya <small>Detail</small>								
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi								
Metode Pemilihan	Penunjukan Langsung								
Nilai Pagu	Rp. 1.508.100.000,00								
Realisasi	<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Jenis Realisasi</th><th>Nilai Realisasi</th><th>Tanggal Realisasi</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">+ Tambah Realisasi</td></tr></tbody></table> Total Nilai Realisasi: Rp. 0,00	No.	Jenis Realisasi	Nilai Realisasi	Tanggal Realisasi	+ Tambah Realisasi			
No.	Jenis Realisasi	Nilai Realisasi	Tanggal Realisasi						
+ Tambah Realisasi									

Nilai Produk Dalam Negeri (PDN)

Nilai Usaha Mikro Kecil (UMK)

Tanggal Paket Selesai *

Tanggal Paket Selesai adalah Tanggal berakhirnya Kontrak

Uraian Pekerjaan

6. Isi Uraian Pekerjaan

Status Paket: Draft

[Simpan](#) [Kembali](#)

1. Lengkapi data paket

2. Tambah Realisasi

3. Isi Nilai PDN

4. Isi Nilai UMK

5. Isi Tanggal Paket Selesai

7. Pilih Simpan Jika Sudah

Pilihan jenis pengadaan

Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Metode Pemilihan	Pengadaan Barang
Nilai Pagu	Pekerjaan Konstruksi
Realisasi	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
	Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi
	Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi
	Jasa Lainnya
Tanggal Paket Selesai *	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Pilihan metode pemilihan

Metode Pemilihan	Penunjukan Langsung
Nilai Pagu	Penunjukan Langsung
Realisasi	Pengadaan Langsung
	Kontes
	Sayembara
	Pengecualian
	Darurat
	Tender Internasional

Tampilan halaman *Form Realisasi*

Beranda » Edit Paket » Form Realisasi

Informasi Paket

Kode Paket	604999
Nama Paket	Pengembangan dan Integrasi Sistem Katalog Elektronik / Belanja Modal Lainnya
Nilai Pagu	Rp. 1.508.100.000,00
Total Nilai Realisasi	Rp. 0,00
Status Paket	Draft

Realisasi

Bukti Pembayaran: Non SPK

Jenis Realisasi: Bukti Pembelian

Nomor Dokumen: [input field]

Nilai Realisasi (Rp) * [input field]

Gunakan koma untuk pemisah desimal.

Tanggal Realisasi * [input field]

Keterangan: [input field]

Pilih Penyedia: [input field]

Pilih Penyedia setelah selesai menyimpan realisasi.

3. Setelah berhasil tersimpan akan muncul *Form Tambah Penyedia*

Realisasi

Bukti Pembayaran: Non SPK

Jenis Realisasi: Bukti Pembelian

Nomor Dokumen: ND130821

Nilai Realisasi (Rp) * 3.000.000,00

Gunakan koma untuk pemisah desimal.

Tanggal Realisasi * 29-10-2021

Keterangan: [input field]

Pilih Penyedia: Data Non SiKaP

No	Nama Penyedia	NPWP	Email	Telp	Alamat

Dokumen Realisasi

Dokumen yang dapat di upload hanya file/dokumen yang memiliki ekstensi *.pdf, *.jpg, *.jpeg, atau *.png.

Dokumen *

Nama File	Tanggal Upload	Aksi

4. Selanjutnya akan muncul form pilih penyedia, jika memilih penyedia data non SIKaP, PPK mengisi data penyedia.

Halaman Pilih Non Badan Usaha

Beranda » Edit Jenis Realisasi » Pilih Non Badan Usaha

Nama Penyedia: Silakan Masukkan Nama Penyedia

NPWP: Silakan Masukkan NPWP Penyedia

Email: Silakan Masukkan Email Penyedia

No. Telepon: Silakan Masukkan No. Telepon Penyedia

Alamat: Silakan Masukkan Alamat Penyedia

Tambah Penyedia Kembali

Pilih tambah penyedia

Isi data penyedia non SIKaP

Pelaku Usaha Non SIKaP

Pilih Penyedia

Data Non SIKaP

Hapus Data

Tambah Penyedia

No	Nama Penyedia	NPWP	Email	Telp	Alamat	
1	Penyedia	11.111.111.1-111.111	penyedia@test.com	081554022998	Jl Sudirman	Hapus

5. Jika data penyedia ada di SIKaP, PPK isi NPWP penyedia yang terdaftar.

Halaman isi NPWP penyedia

Beranda » Edit Jenis Realisasi » Pilih Penyedia

NPWP: Silakan diisi dengan NPWP Penyedia

Cari Penyedia

Pilih cari penyedia

Isikan NPWP penyedia

Silakan pilih salah satu parameter pencarian untuk melakukan pencarian Penyedia, lalu ceklis Penyedia yang akan dimasukkan ke daftar paket.

Kembali

Halaman isi pilih penyedia

Beranda » Edit Jenis Realisasi » Pilih Non Penyedia

Nama Perusahaan: PT. lkpp penyedia 1

NPWP: 12.121.212.1-212.121

Cari Penyedia + Tambah Penyedia

	Nama Perusahaan	NPWP	Email	Telp	Alamat	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	PT. Penyedia 1	12.121.212.1-212.121	jalatest@gmail.com	021345578	jalan test	Belum Pilih

Pilih penyedia

Anda tidak dapat memilih penyedia, karena jumlah penyedia yang terdaftar di pengadaan ini sudah melebihi batas yang di tentukan.

Silahkan pilih salah satu parameter pencarian untuk melakukan pencarian penyedia, lalu ceklist penyedia yang akan di masukan ke daftar penunjukan.

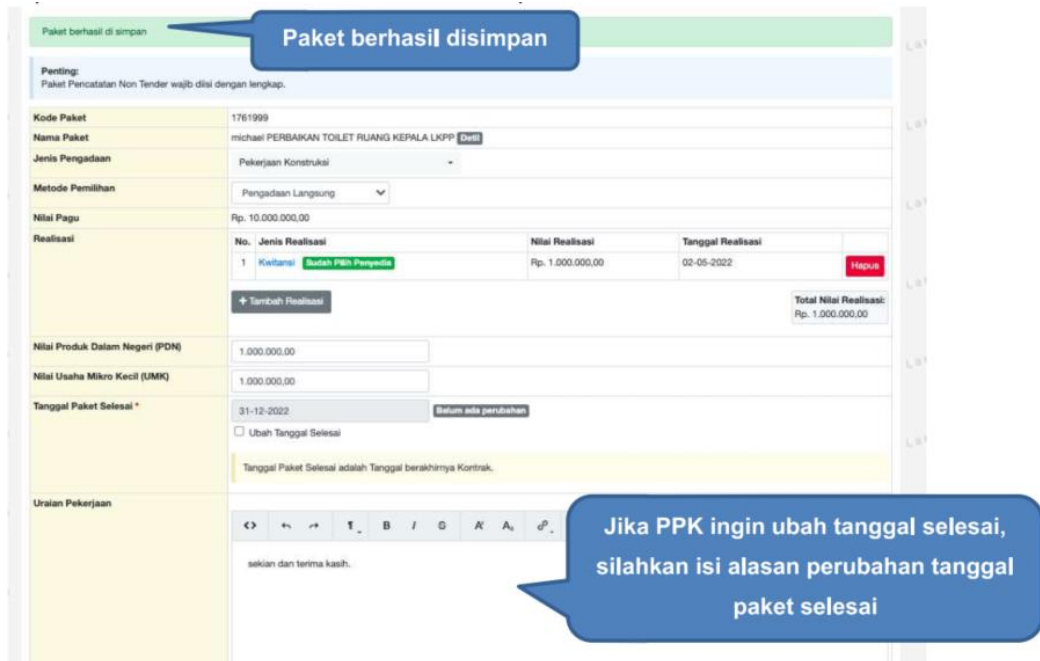
Simpan Kembali

Pilih simpan

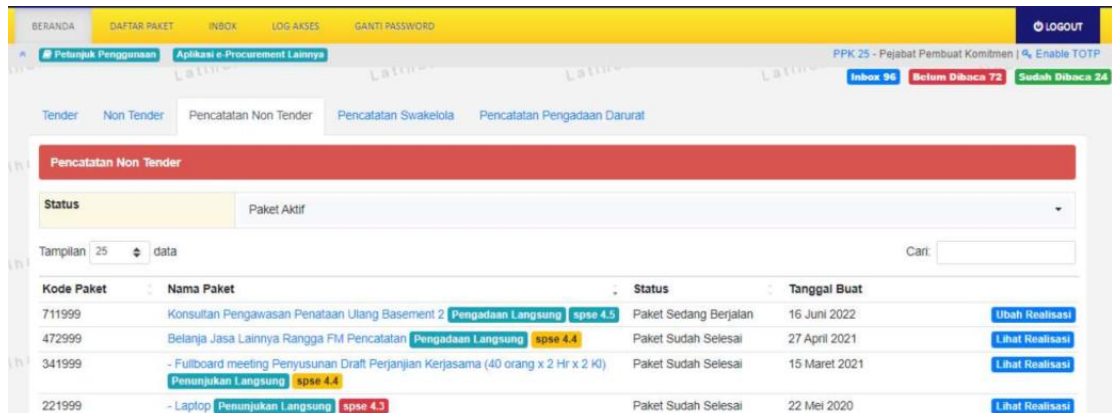
6. Realisasi yang telah dimasukkan akan masuk ke dalam kolom realisasi.

7. Isi uraian pekerjaan, upload informasi lainnya, dan pilih simpan untuk menyimpan data paket pencatatan non-Tender.

8. Jika berhasil disimpan akan keluar notifikasi “paket berhasil disimpan”.



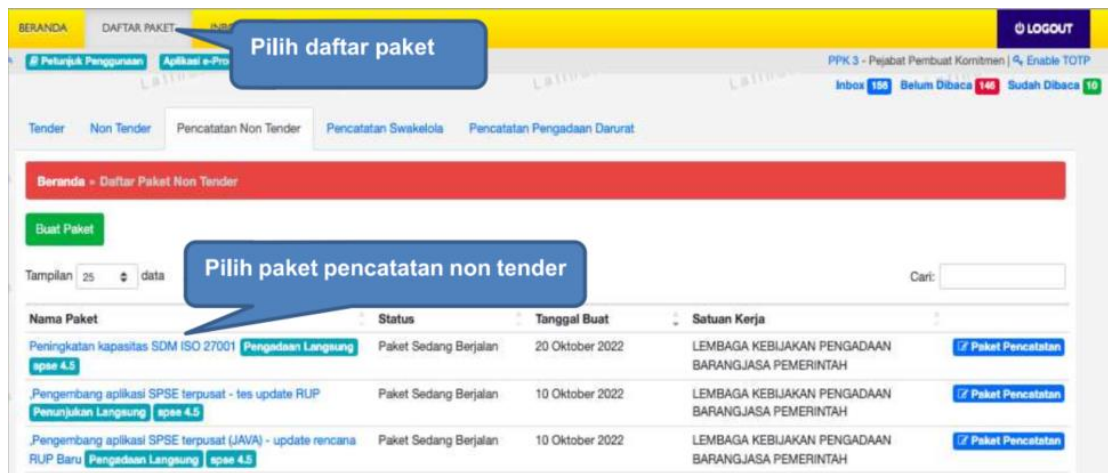
9. Jika sudah selesai simpan, paket pencatatan akan masuk ke beranda. PPK dapat ubah realisasi jika ada perubahan tanggal paket selesai.



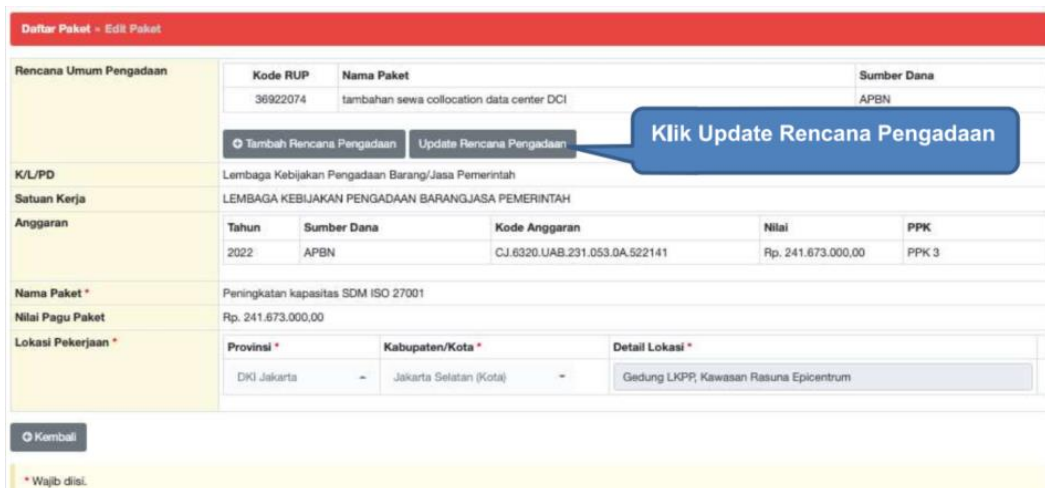
C. Update RUP di Pencatatan Non-Tender

Jika ada perbaikan/perubahan data RUP, PPK dapat melakukan update data RUP dengan menggunakan Kode RUP yang terbaru untuk Paket yang sedang berjalan. *Update* RUP pada pencatatan Non-Tender dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pilih daftar paket untuk pilih update RUP paket pencatatan non-Tender.



2. Selanjutnya klik “Update Rencana Pengadaan”



3. Pilih K/L/PD, Tahun Anggaran, Satuan Kerja, dan Metode Pemilihan.

Daftar Paket - Daftar Rencana Paket

K/L/PD * Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tahun Anggaran 2022 -

Satuan Kerja * LEMBAGA KEBUJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Metode Pemilihan Penunjukan Langsung

Update RUP

Pembuatan paket Pencatatan Non Tender dimulai dengan memilih paket yang sudah diumumkan pada Aplikasi SIRUP terlebih dahulu. Paket yang belum diumumkan pada Aplikasi SIRUP akan berakibat tidak dapat membuat paket Pencatatan Non Tender.

Tampilan 25 data

Kode RUP	Sumber Dana	Metode Pemilihan Penyedia	Pagu	Tahun Anggaran
<input type="checkbox"/> 36922074	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 241,7 Jt	2022
<input type="checkbox"/> 36887396	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 269,5 Jt	2022
<input type="checkbox"/> 36887313	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 206,5 Jt	2022

4. Klik "Pilih Rencana Pengadaan".

<input type="checkbox"/>	35893665	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Umum dan Jemputan	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 235,6 Jt	2022
<input type="checkbox"/>	35892972	Pemeliharaan Inventaris Kantor	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 28,9 Jt	2022
<input type="checkbox"/>	35883537	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I [1 UNIT x 12 BLN]	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 211,9 Jt	2022
<input checked="" type="checkbox"/>	35883376	Sewa Kendaraan Roda 4/Minibus Operasional Kantor dan/atau Lapangan (D.K.I. Jakarta) [1 UNIT x 12 BLN]	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 80,3 Jt	2022
<input checked="" type="checkbox"/>	35117212	Efisiensi belanja asuransi gedung dan bangunan	APBN	Penunjukan Langsung	Rp 145,9 Jt	2022

Tampilan 1 sampai 25 dari 38 data

Pilih Rencana Pengadaan

5. Jika berhasil RUP akan ter-update.

Daftar Paket - Edit Paket

Rencana Umum Pengadaan

Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
35117212	Efisiensi belanja asuransi gedung dan bangunan	APBN
35883376	Sewa Kendaraan Roda 4/Minibus Operasional Kantor dan/atau Lapangan (D.K.I. Jakarta) [1 UNIT x 12 BLN]	APBN

Konsolidasi ?

Tambah Rencana Pengadaan Update Rencana Pengadaan

K/L/PD Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Satuan Kerja LEMBAGA KEBUJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Anggaran

Tahun	Sumber Dana	Kode Anggaran	Nilai	PPK
2022	APBN	WA.6600.EBA.994.002.0A.523113	Rp. 145.857.000,00	PPK 3
2022	APBN	WA.6600.EBA.994.002.0E.522141	Rp. 80.280.000,00	PPK 3

Nama Paket * Peningkatan kapasitas SDM ISO 27001

Nilai Pagu Paket Rp. 226.137.000,00

Lokasi Pekerjaan *

Provinsi *	Kabupaten/Kota *	Detail Lokasi *
DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, RT.2/RW.5,
DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	LKPP

Kembali

* Wajib diisi.

6. RUP gagal ter-update jika nilai total realisasi lebih besar dari nilai pagu RUP.

Daftar Paket - Daftar Rencana Paket

Tidak dapat melakukan update data karena Nilai Total Realisasi lebih besar dari Nilai Pagu RUP

Gagal update RUP

K/L/PD *	Pilih K/L/PD
Tahun Anggaran	2022
Satuan Kerja *	Pilih Satuan Kerja
Metode Pemilihan	Penunjukan Langsung

Update RUP

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI